

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA PADA  
DESA AMAN DAMAI KEC SIRAPIT  
KABUPATEN LANGKAT  
TAHUN 2018-2020**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**DEA NOVITA SARI  
NIM :188330078**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)22/6/23

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA PADA  
DESA AMAN DAMAI KEC SIRAPIT  
KABUPATEN LANGKAT  
TAHUN 2018-2020**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**DEA NOVITA SARI**

**NIM :188330078**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)22/6/23

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA PADA  
DESA AMAN DAMAI KEC SIRAPIT  
KABUPATEN LANGKAT  
TAHUN 2018-2020**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area

OLEH :

**DEA NOVITA SARI  
188330078**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)22/6/23

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Pada Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kab. Langkat Tahun  
2018-2020

Nama : Dea Novita Sari

NPM : 188330078

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembanding



**Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si**

**Warsani Purnama Sari, SE, AK, MM**

Pembimbing

Pembanding

Mengetahui:



**Ahmad Rafiq, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA**  
Dekan



**Fauziah Rahman S.Pd, M.Ak**  
Ka.prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 10 April 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

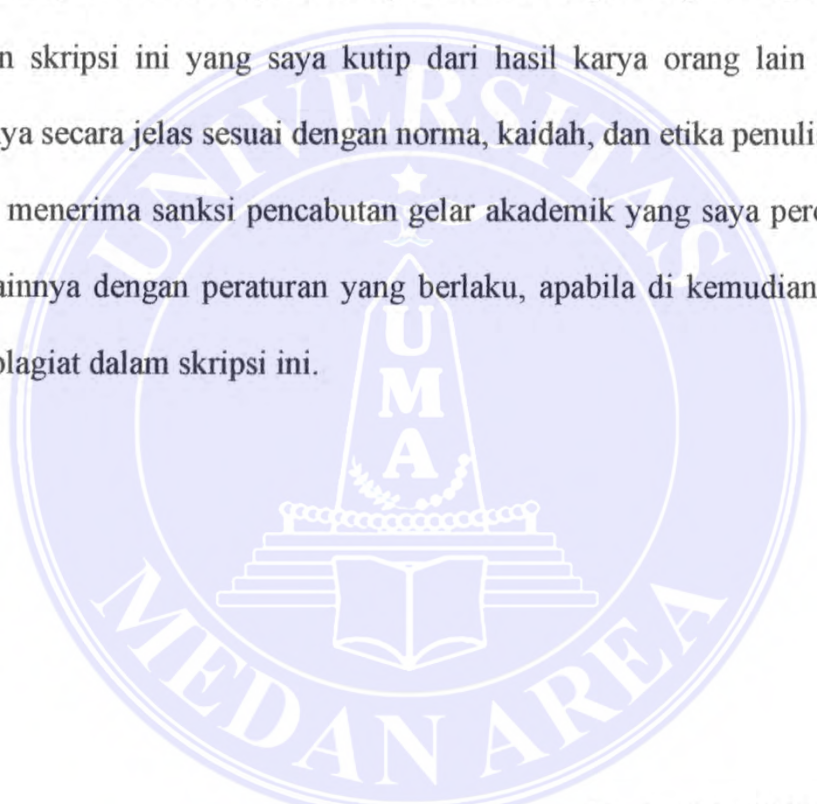
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/6/23

Tanggal Lulus : 10 April 2023

**HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kab. Langkat Tahun 2018-2020” yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan Mei 2023

Peneliti



Dea Novita Sari  
188330078



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Novita Sari  
NPM : 188330078  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kab. Langkat Tahun 2018-2020. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 26 Mei 2023  
Yang menyatakan



Dea Novita Sari  
18833078

UNIVERSITAS MEDAN AREA

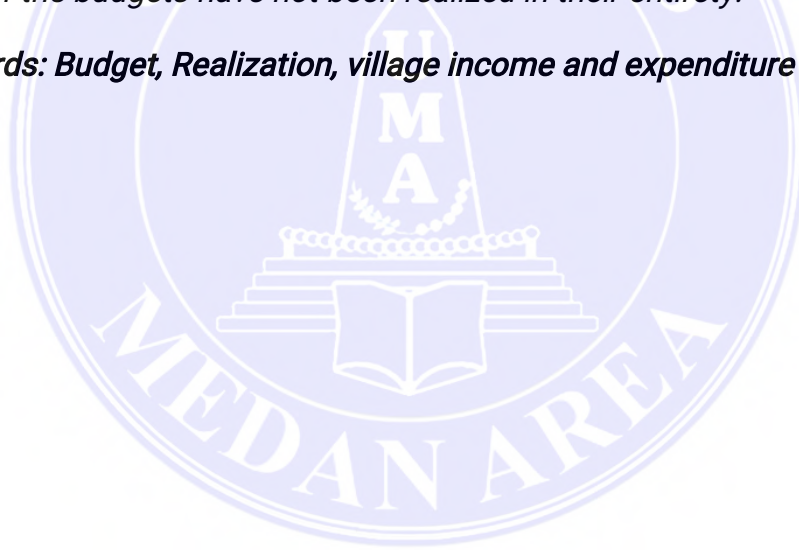
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Dea Novita Sari  
18833078

## ABSTRACT

*This study aims to find out the report on the realization of the village income and expenditure budget in 2018-2020 in Aman Damai Village, Sirapit District, Langkat Regency. This study uses a descriptive method with a qualitative approach with interviews with related village officials. The results of the study indicate that the sources of income for Aman Damai Village are village original income and transfer income and expenditures issued by Aman Damai Village, namely the field of development implementation, the field of village administration, the field of community development and the field of community empowerment. The analysis of the realization of the village income and expenditure budget reports has been realized well, although some of the budgets have not been realized in their entirety.*

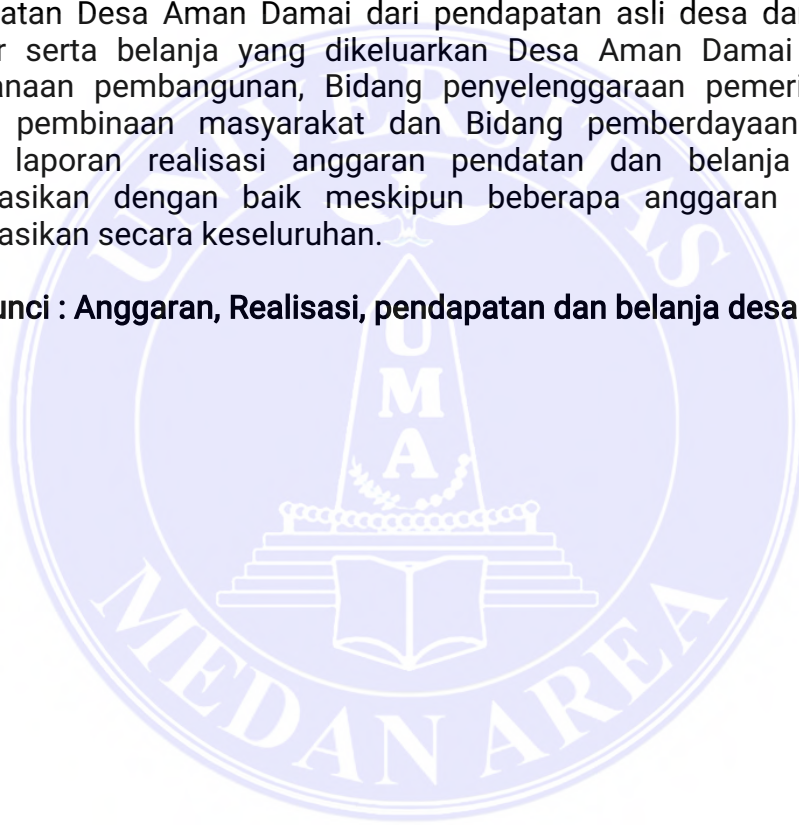
**Keywords:** Budget, Realization, village income and expenditure



## ABSTRAK

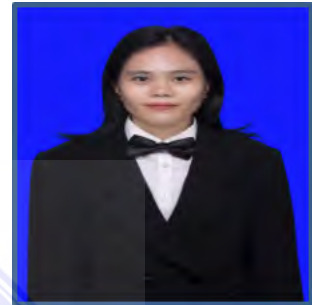
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2018-2020 pada Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan wawancara dengan perangkat desa yang terkait. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sumber pendapatan Desa Aman Damai dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer serta belanja yang dikeluarkan Desa Aman Damai yaitu Bidang pelaksanaan pembangunan, Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang pembinaan masyarakat dan Bidang pemberdayaan masyarakat. Analisa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa sudah direalisasikan dengan baik meskipun beberapa anggaran belanja tidak direalisasikan secara keseluruhan.

**Kata Kunci : Anggaran, Realisasi, pendapatan dan belanja desa**





## RIWAYAT HIDUP



<b>Nama</b>	<b>Dea Novita Sari</b>
<b>Npm</b>	<b>188330078</b>
<b>Tempat,Tanggal Lahir</b>	<b>Gunung Tinggi, 26 September 1999</b>
<b>Nama Orang Tua</b>	
<b>Ayah</b>	<b>Ngempani Pelawi</b>
<b>Ibu</b>	<b>Nena evila Br Sitepu</b>
<b>Riwayat Pendidikan</b>	
<b>SMP</b>	<b>SMP Negeri 7 Binjai</b>
<b>SMA</b>	<b>SMA Negeri 1 Binjai</b>
<b>Riwayat Studi di UMA</b>	<b>Selama Mengikuti Perkuliahan penulis juga mengikuti Magang Di PT.Asuransi JiwaSraya dan sekarang bernama IFG LIFE</b>
<b>Pengalaman Kerja</b>	
<b>No. Hp</b>	<b>085261059097</b>
<b>Email</b>	<b><a href="mailto:novitadea534@gmail.com">novitadea534@gmail.com</a></b>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Desa Aman Damai Kec. Sirapit Kabupaten Langkat Tahun 2018-2020".

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Msc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D,CIMA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Univesitas Medan Area.
4. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing peneliti, dan selalu memberikan saran-saran yang baik.
5. Ibu Warsani Purnamasari SE,AK,CA,MM. yang telah bersedia menjadi Dosen Pembanding
6. Ibu Indah Cahya Sagala S.Pd, M.Si yang telah bersedia menajdi Dosen Sekertaris
7. Bapak Kepala Desa dan Pegawai pemerintahan Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penelitian dan juga memberikan kesempatan riset di Desa Aman Damai.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua peneliti, Ayah Pani Pelawi dan Ibu Nena Evila Br Sitepu. Terima kasih untuk doa dan dukungan serta kasih sayangnya.
9. Terima kasih untuk teman dekat saya Rani Jesika Sembiring, Sella Amayda Sembiring, Arihta Pinem, karya siregar, yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.



Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa isi maupun teknik penulisannya jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, peneliti mengharapkan kritik ataupun saran dari pembaca demi menyempurnakan proposal skripsi ini. Semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan pembaca sekalian.

Medan, Mei 2023

Penulis



Dea Novita sari  
188330078

DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>7</b>
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pemerintah Desa	7
2.1.2 Anggaran Desa	12
2.1.3 Prinsip Anggaran Desa	13
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	14
2.1.5 komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	17
2.1.6 Laporan Realisasi Anggaran	23
2.1.7 Asas Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	26
2.1.8 Penyajian Laporan Realisasi	28
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Berpikir	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.1.1 Jenis penelitian	34
3.1.2 Lokasi Penelitian	34
3.1.3 Waktu penelitian	34
3.2 Populasi dan Sampel	35
3.2.1 Populasi	35
3.2.2 Sampel	35
3.3 Jenis dan Sumber Data	35
3.3.1 Jenis Data	36
3.3.2 Sumber Data	36
3.4 Teknik pengumpulan data	37
3.5 Metode Pengolahan Data	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Objek penelitian	40
4.1.1 Sejarah Desa Aman Damai	40
4.1.2 Visi dan Misi	41
4.1.3 Struktur Organisasi Desa	43
4.1.4 Letak Geografis	43

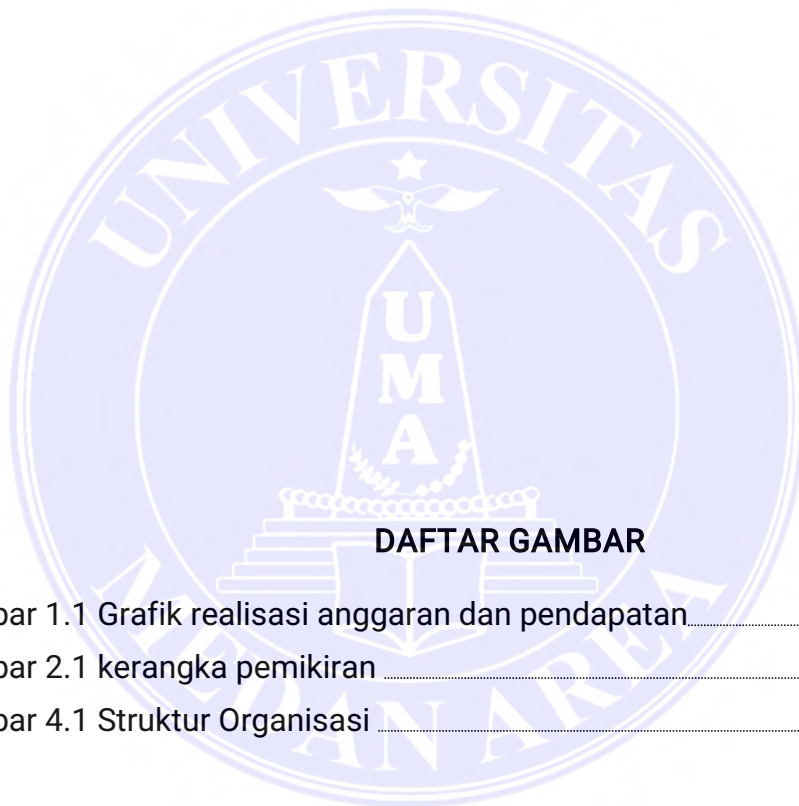
4.1.5 Demografi Desa Aman Damai.....	44
4.1.6 Perekonomian Desa Aman Damai.....	44
4.1.7 Sarana dan Prasarana Sosial Desa Aman Damai.....	46
4.1.8 Pendidikan Masyarakat Desa Aman Damai.....	49
4.2 Hasil Penelitian.....	50
4.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 2018.....	50
4.2.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 2019.....	56
4.2.3 Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 2020.....	61
4.3 Pembahasan.....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>
5.1 kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>

### DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	38
Tabel 4.1 Jumlah penduduk desa Aman Damai.....	47
Tabel 4.2 Perekonomian Desa Aman Damai.....	48
Tabel 4.3 Sarana Pendidikan Desa Aman Damai.....	49
Tabel 4.4 Sarana Ibadah Desa Aman Damai.....	50
Tabel 4.5 Sarana kesehatan Desa Aman Damai.....	51
Tabel 4.6 Sarana Umum Lainnya Desa Aman Damai.....	52
Tabel 4.7 Pendidikan Masyarakat Desa Aman Damai.....	53
Tabel 4.8 Pendapatan dan Belanja Desa Aman Damai 2018.....	54
Tabel 4.9 Ringkasan Realisasi Pendapatan Asli Desa 2018.....	55
Tabel 4.10 Ringkasan Realisasi Pendapatan Transfer 2018.....	56
Tabel 4.11 Ringkasan Realisasi Bidang Pembangunan desa 2018.....	57

Tabel 4.12 Ringkasan Realisasi Bidang Pembinaan desa 2018.....	58
Tabel 4.13 Ringkasan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2018.....	58
Tabel 4.14 Ringkasan Realisasi Bidang pemberdayaan masyarakat 2018.....	60
Tabel 4.15 Pendapatan dan Belanja Desa Aman Damai 2019 .....	61
Tabel 4.16 Ringkasan Realisasi Pendapatan Asli Desa 2019 .....	62
Tabel 4.17 Ringkasan Realisasi Pendapatan Transfer 2019.....	63
Tabel 4.18 Ringkasan Realisasi Bidang Pembangunan desa 2019.....	64
Tabel 4.19 Ringkasan Realisasi Bidang Pembinaan desa 2019.....	64
Tabel 4.20 Ringkasan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2019.....	65
Tabel 4.21 Ringkasan Realisasi Bidang pemberdayaan masyarakat 2019.....	66
Tabel 4.22 Pendapatan dan Belanja Desa Aman Damai 2020 .....	67
Tabel 4.23 Ringkasan Realisasi Pendapatan Asli Desa 2020 .....	68
Tabel 4.24 Ringkasan Realisasi Pendapatan Transfer 2020.....	69
Tabel 4.25 Ringkasan Realisasi Bidang Pembangunan desa 2020.....	70
Tabel 4.26 Ringkasan Realisasi Bidang Pembinaan desa 2020.....	71
Tabel 4.27 Ringkasan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2020.....	72
Tabel 4.28 Ringkasan Realisasi Bidang pemberdayaan masyarakat 2020.....	73
Tabel 4.29 Ringkasan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana 2020.....	74





### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik realisasi anggaran dan pendapatan.....	4
Gambar 2.1 kerangka pemikiran .....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	46



### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Keuangan Desa Aman Damai 2018 .....	82
Lampiran 2 Laporan Keuangan Desa Aman Damai 2019.....	83
Lampiran 3 Laporan Keuangan Desa Aman Damai 2020.....	84
Lampiran 4 Badan Usaha Desa Aman Damai .....	85
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian.....	86
Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian.....	87



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Desa adalah suatu daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya. Sesuai dengan hal tersebut pengertian desa dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa.

Implementasi otonom bagi desa akan menjadikan kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus di pertanggung jawabkan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Diterbitkannya Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan. Dengan adanya peraturan dari menteri maka desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga dengan demikian besar harapan pemerintah desa dapat mengelola keuangannya serta melaporkannya secara terbuka dan dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam segi pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran

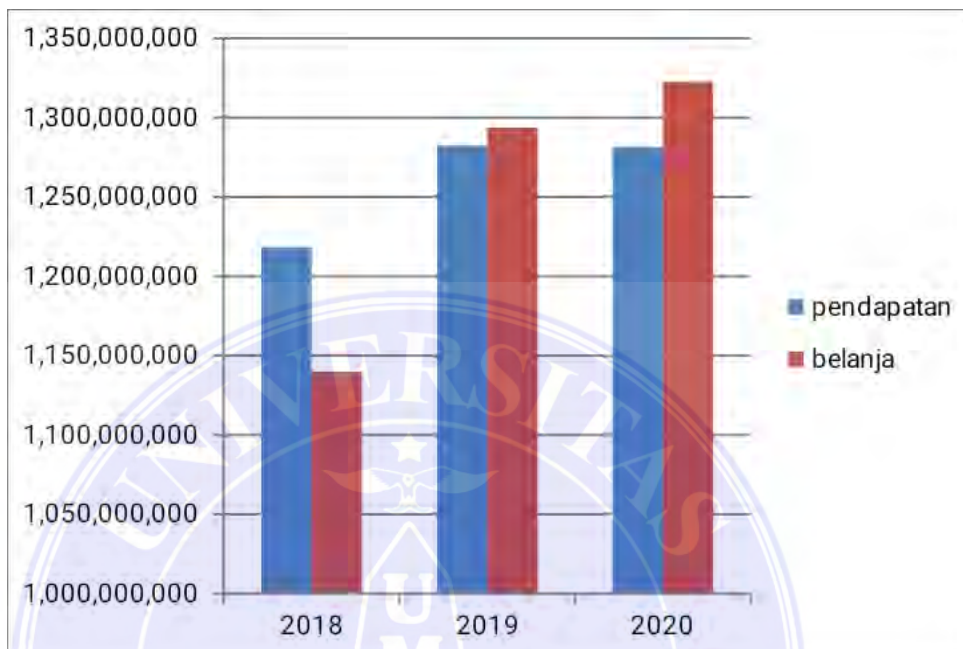
Peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa belanja desa adalah “Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggarannya yang tidak diperoleh kembali pembayarannya. Definisi yang telah di ungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja desa merupakan suatu pengeluaran rekening desa yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun anggaran atau terjadinya hutang yang dapat mengakibatkan pengurangan ekuitas dana”. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas serta disetujui bersama dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) kemudian ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang adalah suatu wilayah otonom yang paling rendah, secara otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam proses pembangunan desa tidak hanya kemampuan dari pemerintah desa itu sendiri tetapi didukung oleh faktor penting seperti dalam proses pembangunan, karena dalam proses pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat itu sendiri dan juga peran masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan yang berlangsung di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Aman Damai Kec. Sirapit Kab. Langkat, desa Aman Damai terdiri dari tujuh dusun yang terdiri dari dusun satu, dusun dua, dusun tiga, dusun empat, dusun lima, dusun enam, dan dusun tujuh. Jumlah penduduk pada desa aman damai pada tahun 2020 yaitu 2781 orang.

Dari tahun ke tahun pendapatan desa di Desa Aman Damai Kec. Sirapit Kab. Langkat, selalu mengalami peningkatan yang tampak dari kegiatan pengelolaan APBDes yaitu pada sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Hal dapat dilihat dari grafik realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Aman Damai 2018-2020



**Gambar 1.1 Grafik realisasi anggaran dan pendapatan**

sumber: diolah penulis 2021

Berdasarkan gambar 1.1 maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 Desa Aman Damai menerima pendapatan sebesar 1.218.282.000, tetapi belanja desa pada tahun 2018 mencapai 1.139.984.200. Dan pada tahun 2019 pendapatan Desa Aman Damai meningkat sebesar 1.282.512.000, dan belanja pada tahun 2019 tidak sesuai dengan belanja desa yaitu sebesar 1.293.767.000. Dan pada tahun 2020 Desa Aman Damai menerima pendapatan sebesar 1.281.437.788, tetapi nilai belanja Desa Aman Damai tidak sesuai dengan pendapatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.295.496.000 oleh karena itu dapat disimpulkan setiap nilai realisasi pada

Desa Aman Damai tidak berbanding lurus dengan belanja Desa Aman Damai.

Selain itu ada penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda yaitu dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zalukhu (2020) pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hasil yang di dapat pada desa Luru 1 Afulu kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara penggunaan anggaran desa masih rendah dan anggaran tidak terealisasi cukup besar khususnya dibidang pembinaan dan pemberdayaan dan pada hasil yang menunjukkan bahwa dari 2017 sampai dengan 2019 anggaran yang dapat direalisasikan hanya sebesar 70% dan 30% anggaran tidak dapat di realisasikan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Candra (2019) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif khasim Riau hasil yang di dapat pada penelitian tersebut adalah anggaran pendapatan dan realisasi pada desa Pulau Berelo Riau sudah terealisasi dengan bagus atau sudah efektif hal ini dilihat dari persentase realisasi yang di peroleh yaitu 95% nilai anggaran sudah terealisasi hal ini menunjukkan hasil analisis yang berbeda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa Aman Damai kecamatan sirapit kabupaten langkat dengan judul "ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA DESA AMAN DAMAI KEC. SIRAPIT KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018-2020"

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian maka penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimanakah Analisis Realisasi Anggaran



Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Aman Damai kecamatan Sirapit Tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Bagaimana Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Aman Damai Kec. Sirapit kab. Langkat Tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020. Memberikan gambaran penggunaan dana desa di Desa Aman Damai.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihakantara lain:

#### 1. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang telah diperoleh selama bangku perkuliahan ke dalam masalah yang sebenarnya terjadi pada desa Aman Damai kecamatan sirapit kabupaten langkat yang menyangkut realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018 sampai dengan 2020.

#### 2. Bagi Pemerintah Desa Aman Damai

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, terkhusus bagi Desa Aman Damai.

### 3. Bagi Akademis

Sebagai bahan acuan serta pertimbangan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca dan sangat diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun skripsi atau melakukan penelitian yang berhubungan dengan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di kemudian hari dan mendapatkan perbandingan yang akan diteliti

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan mengenai urusan bagi pemerintahan serta kepentingan bagi masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam pemerintahn desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa serta badan permusyawaratan desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia". Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari ketua RW, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa harus dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tahapan pengelolaan dana desa sebagai berikut:

#### 1. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 20 adalah sebagai berikut:

##### a. Sekretaris Desa

menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 24 adalah sebagai berikut:

a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

## 3. Penatausahaan

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 35 adalah sebagai berikut:

a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan

dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

d. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### 4. Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37 bahwa tata cara dalam melaksanakan tahapan pelaporan adalah:

a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

b. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

c. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### 5. Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 38 pertanggungjawaban terdiri dari:

a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa



terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri tiga format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun 12 tersebut, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah desa. Selain itu pengelolaan lain yang diatur Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah pembinaan dan pengawasan.

Tahapan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, yaitu:

#### 1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa).
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam

APBDesa.

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. 13 Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa). yang berasal dari unsur aparatur desa, yakni sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa) yang mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

## 3. Kepala Seksi

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### 4. Bendahara

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bendahara dijabat oleh staff pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

#### 2.1.2 Anggaran Desa

Anggaran yaitu “Budgeting menunjukan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana”.

Hal ini sejalan dengan Nordiawan (2006) menyatakan

bahwa "Anggaran merupakan sebuah rencana finansial yang menyatakan rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut, perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta sebesar besar pemasukan tersebut". Sedangkan menurut Halim (2007) anggaran adalah "Suatu rencana operasional yang dinyatakan dalam suatu uang dari organisasi, dimana suatu pihak menggambarkan perkiraan pendapatan atau penerimaan guna menutupi pengeluaran tersebut untuk periode tertentu yang umumnya satu tahun".

Berdasarkan defenisi-defenisi yang diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Anggaran merupakan rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang

### 2.1.3 Prinsip Anggaran Desa

Sukasmanto (2004:73) menjelaskan proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

#### 1. Transparansi

Keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

#### 2. Akuntabilitas

Menyangkut kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggung

jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa

### 3. Partisipasi masyarakat

Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa.

### 4. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif

Menyangkut ketertiban masyarakat dalam penyusunan APBDesa. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat menyangkut kepekaan pemerintah terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

### 5. Professional

Menyangkut keahlian yang harus di miliki oleh seorang aparatur sesuaidengan jabatannya.

## 2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menuru Wiratna (2015:33) menyatakan bahwa anggaran pendaptan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan beupa rencana-rencana program yang di biyai dengan uang desa. Adanya anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pelaksanaan pemerintahan desa akan memiliki rencana yang strategis dan terukur



berdasarkan anggaran yang sudah ada dan yang akan digunakan. Dengan melalui APBDes kebijakan desa dilaksanakan dalam berbagai program atau kegiatan karena anggarannya sudah ditentukan. Kegiatan pemerintah desa seperti pembangunan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam tahun berjalan, anggarannya sudah dirancang, dan pelaksanaannya sudah dapat dipastikan (Puspawardani, 2017:3 ).

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutupi keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran dapat diartikan sebagai pengelolaan aktifitas belanja pemerintah serta memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah dalam periode tahunan. Kemungkinan besar anggaran disiapkan dalam waktu kurang lebih dari satu tahun (Nurlan Darise dalam Gramini, et. al, 2017)

Anggaran merupakan suatu instrumen penting didalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. didunia bisnis maupun organisasi sektor publik, anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. bahkan di akuntansi pemerintahan dibuat pencatatan anggaran, mengingat anggaran adalah bagian penting dalam aktivitas pemerintahan (Mardiasmo dalam Kusumadewi, 2016). Penganggaran merupakan suatu proses penyusunan rencana keuangan, pendapatan, dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-

masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan kedalam program berdasarkan tugas dan tanggungjawab dari satuan kerja tertentu.

Pelaksanaan APBDes akan dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran oleh kepala desa kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa (BPD) dalam bentuk perhitungan APBDes. Perhitungan atau penjumlahan APBDes ini ditetapkan dengan peraturan desa yang telah ditetapkan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. pengawasan atas ketertiban dan kelancara pelaksanaan APBDes dilakukan oleh BPD (Soeharjo, 2017).

#### 1. Anggaran Pendapatan

Desa Pendapatan desa adalah semua penerimaan kas desa yang menambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah desa yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah desa

- a. Pendapatan asli desa (PADesa), Pendapatan asli desa dipungut oleh pemerintahan desa berdasarkan peraturan daerah.
- b. Pendapatan alokasi dana desa (ADD)
- c. Pendapatan bagi hasil pajak
- d. Pendapatan bagian dari retribusi
- e. Pendapatan alokasi dana desa dari APBN
- f. Pendapatan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh kabupaten atau kota

- g. Pendapatan bantuan dari pemerintah
  - h. Pendapatan bantuan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota
  - i. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
2. Anggaran Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah desa (Siregar, 2015:31).

a. Belanja langsung

- 1. Belanja kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa
- 2. Belanja bantuan sosial
- 3. Belanja subsidi
- 4. Belanja tunjangan
- 5. Belanja pegawai atau penghasilan tetap
- 6. Belanja tak terduga
- 7. Belanja bantuan keuangan

b. Belanja langsung

- 1. Belanja barang dan jasa
- 2. Belanja modal

### 3. Belanja pegawai

#### 2.1.5 komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

##### 1. Pendapatan desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

##### a. Pendapatan asli desa

1. Hasil usaha desa yaitu hasil yang berasal dari usaha desa. Misalnya hasil BUMDes, tanah kas desa.
2. Hasil Aset yaitu hasil yang berasal dari pemanfaatan asset desa. Misalnya tambatan perahu, pasar desa, wisata yang dikelola desa dan jaringan irigasi.
3. Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.

##### b. Pendapatan Transfer Desa

Pendapatan transfer desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD). Pendapatan transfer terdiri atas:

### 1. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

### 2. Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah.

Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi daerah adalah dana yang berasal dari pembagian hasil pajak dan retribusi daerah. Desa mendapat alokasi dari dana ini sebesar 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Misalnya: bagi hasil pajak.

### 3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. ADD merupakan bagian dari Dana Perimbangan diterima Pemerintah Daerah Kabupaten untuk desa.

### 4. Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota adalah keuangan untuk desa dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan ini bersifat umum dan khusus.

### c. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan



sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

## 2. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja desa terdiri dari:

### a. Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD).
2. Operasional perkantoran terdiri dari: Belanja barang dan jasa, misalnya belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dana atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, opsional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (bantuan untuk opsional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,

perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa), dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli komputer, beli meja.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Desa Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dan lain-lain.

c. Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Desa Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan taruna.

d. Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan

hidup, pengelolaan sampah mandiri.

e. Bidang Belanja Tak Terduga

Belanja ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

i. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Tahun sebelumnya SiLPA sebagaimana yang dimaksud antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA sebagaimana yang dimaksud merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja
2. Mendanai kegiatan lanjutan

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.

### c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pengeluaran Pembiayaan mencakup:

#### 1. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

#### 2. Penyertaan Modal Desa

Pemerintah desa dapat melakukan investasi pada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) atau badan swasta lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) setelah ada ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

## 2.1.6 Laporan Realisasi Anggaran

### 1. Definisi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara sejumlah yang digambarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD di akhir periode, (Indra Bastian, 2006:387).

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun

juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang.

## 2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Adapun tujuan penyusunan laporan realisasi anggaran yaitu membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu menciptakan efisien dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan dan memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas dalam belanja.

## 3. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Adapun manfaat penyusunan laporan realisasi anggaran menurut yaitu dalam laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumberdaya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparat.

### a. Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar



Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No.02 Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas. Struktur Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi antara lain:

### 1. Pendapatan

- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

### 2. Belanja

- a. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

### 3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan

dan dana bagi hasil.

#### 4. Surplus atau Defisit

Surplus atau defisit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

#### 5. Pembiayaan (*Financing*)

Pembiayaan (*Financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

##### b. Manfaat Informasi Laporan Realisasi

Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No.02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, dalam laporan realisasi anggaran akan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Melalui informasi yang yang dihasilkan akan membantu para pengguna laporan keuangan dalam menentukan proses pengambilan keputusan selanjutnya, serta mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi dan akuntabilitas publik. Dengan laporan realisasi anggaran tersebut, dapat diperoleh informasi yang menunjukkan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

##### 1. Penyediaan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan

sumber daya ekonomi.

2. Penyediaan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Laporan realisasi anggaran akan diperoleh informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima dalam periode mendatang yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat atau daerah. Laporan realisasi tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisiensi, efektif dan hemat, sesuai dengan anggaran serta sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

### **2.1.7 Asas Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**

Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran dikenal beberapa asas antara lain :

1. Asas Terinci

Disusun secara sistematis dari sektor-sektor program, proyek atau kegiatan secara detail.

2. Asas Keseluruhan

Disusun mencakup semua aktivitas keuangan pemerintah.

3. Asas Keterbukaan

Pemerintah dalam menyampaikan APBN disampaikan secara terbuka, dicetak diberbagai media cetak, disampaikan oleh

presiden kepada DPR untuk dibahas.

#### 4. Asas Periodik

Penetapan program APBN, negara memperhatikan penerimaan 6 (enam) bulan pertama sebagai dasar jumlah besarnya APBN dalam 1 (satu) tahun.

#### 5. Asas Pembebanan Kewajiban

Dibebani pengeluaran satu tahun pada saat kontrak atau pesanan ditandatangani. Aktual : Piutang dibukukan sebagai penerimaan, hutang dibukukan sebagai pengeluaran dalam perhitungan satu tahun anggaran. Kas: Penerimaan dibukukan pada saatn kas menerima uang. Pengeluaran dibukukan pada saat kas membayar kewajiban negara.

#### 6. Asas Fleksibilitas

1. Legislatif dapat merevisi anggaran sampai sektor dan sub sektor
2. Eksekutif dapat merevisi anggaran sampai dengan program atau kegiatan anggaran

### 2.1.8 Penyajian Laporan Realisasi

Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Laporan Realisasi Anggaran disajikan berdasarkan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran:

#### 1. Tujuan

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Pelaporan realisasi anggaran menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## 2. Periode Pelaporan

Manfaat suatu laporan realisasi anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Suatu entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sedangkan Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun.

## 3. Isi Laporan

Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara



anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angkaangka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

#### 4. Informasi dalam Laporan Realisasi Anggaran

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau di catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan penulisan skripsi, selain itu tujuan lain dari penelitian terdahulu ini untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penulisan skripsi. Maka dalam tinjauan pustaka ini penulis melampirkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Arieska Eka Agustina 2018	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Banjerejo kecamatan Boja kabupaten Kendal Tahun	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015 – 2017 cukup baik untuk setiap tahunnya walaupun setiap tahunnya presentase realisasinya berbeda. Pada tahun 2015

		Anggaran 2015-2017	presentase mencapai 100% untuk Pendapatan Desa dan Belanja Desa. Tetapi pada tahun 2015 mengalami Desa Banjarejo terjadi surplus dimana Belanja Desa lebih sedikit dibandingkan Pendapatan Desa. Pada tahun 2016 Pendapatan Desa terealisasi sebesar 96,7% sedangkan Belanja Desa presentase realisasinya 106,8%. Pengeluaran Belanja Desa lebih banyak dibandingkan Pendapatan Desa sehingga pada tahun 2016 Desa Banjarejo mengalami defisit. Pada tahun 2017 presentase realisasi mencapai 101,3% untuk Pendapatan Desa dan Belanja Desa. Pada tahun 2017 Desa Banjarejo tidak mengalami surplus maupun defisit, pengeluaran Belanja Desa sesuai dengan jumlah Pendapatan Desa.
2	Nur Kholifatul Hidayah 2018	Analisis Pendapatan Desa Terhadap Pendapatan Desa Sambilawang Priode 2015-2017	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka didapatkan kesimpulan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang terdapat di Desa Sambilawang sudah terealisasi dengan baik hal ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan yang selalu melebihi anggaran yang ditargetkan dan jumlah belanja selalu lebih rendah daripada pendapatan belanja  di Desa Sambilawang. Hasil perhitungan secara manual maupun menggunakan alat hitung SPSS menghasilkan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,68 dan nilai koefisien determinasi (r <sup>2</sup> ) sebesar 0,47. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan desa mempengaruhi belanja desanya dan sebesar 47% pendapatan desa mampu memenuhi belanja desa pada Desa Sambilawang dan sebesar 53% masih membutuhkan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
3	Ruliaty 2019	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk	Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam memenuhi

		Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone	kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat masih sangat rendah dan bahkan mengalami naik turun dari tahun ke tahun, yaitu dari 4,19% pada tahun 2014 menjadi 4,33% pada tahun 2015 dan 3,01% pada tahun 2016. Dimana terjadi peningkatan kemandirian daerah yang selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2015. Dan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya tergolong tidak efektif dan tergolong efisien, yakni pada tahun 2014 memiliki rasio efektifitas 62,19% dan rasio efisiensi 2,13% kemudian pada tahun 2015 memiliki rasio efektifitas sebesar 59,53% dan rasio efisien 2,71%, dan pada tahun 2016 memiliki rasio efektifitas 32,96% rasio efisien sebesar 2,16%.
5	Rinda Nofatna Zalukhu (2020)	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Luru 1 Afulu Kabupaten Nias	Hasil yang diperoleh pada penelitian adalah tahapan perencanaan pengelolaan APBDes di Desa luru 1 Afulu Nias Utara sudah memenuhi format sesuai dengan apa yang dilampirkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa telah melaksanakan dan menerapkan prinsip partisipatif kepada masyarakat dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan tersebut sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dan Tahap pertanggungjawaban APBDes dalam hal teknis sudah baik tetapi untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang. Sehingga masih perlu adanya pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahunnya. Selain itu, perlu diperhatikan dengan adanya faktor penghambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap maupun keterlambatan waktu

			pelaporan, maka diperlukan pembinaan dalam proses mengelola keuangan.
5	Adam Tambunan 2021	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Parbuluan IV Kab. Dairi	Pelaksanaan realisasi anggaran pada bidang pembangunan desa telah dilaksanakan diantaranya direalisasikannya anggaran pada pembangunan infrastruktur berupa jalan, baik itu pembukaan ruas jalan, pengerasan, ataupun pengaspalan, hal ini tercermin pada serapan dana dalam laporan realisasi anggaran periode laporan realisasi anggaran 2017-2019

### 2.3 Kerangka Berpikir

Anggaran Pendapatan dan Belanja desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rancangan keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Perwakilan Desa melalui Peraturan Desa. Tahun Anggaran APBDes meliputi masa satu tahun mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDes terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan pembiayaan. Kebijakan alokasi anggaran ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pendapatan desa yang meningkat tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Dalam penelitian ini untuk menganalisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa dengan menggunakan laporan keuangan desa aman damai Kec. Sirapit Kab. Langkat sebagai unit analisis dengan demikian dapat diketahui laporan realisasi anggaran pendapatan sesuai atau tidak antara pendapatan dan belanja

Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka pemikiran



### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.1.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui anggaran pendapatan desa dan belanja desa pada Desa Aman Damai

#### **3.1.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi yaitu Desa Aman Damai Kec. Sirapit Kab. Langkat. Website [Amandamai.langkatkab.go.id](http://Amandamai.langkatkab.go.id). Jalan Aman Damai, dusun v

#### **3.1.3 Waktu penelitian**

Waktu penelitian yang dilakukan mulai dari bulan Desember 2021 sampai dengan Mei 2023

**Tabel 3.1**  
Jadwal penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021	Tahun 2022								Tahun 2023	
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Apr	
1	Pengajuan judul	█	█									
2	Penyusunan proposal			█	█	█	█	█				
3	Seminar proposal							█	█			
4	Seminar Hasil									█		█
5	Sidang											

## 3.2 Populasi dan Sampel

### 3.2.1 Populasi

Menuru Sugioyono (2017:81) populasi adalah wilayah generalisasi objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Pada peneliti ini populasinya adalah laporan keuangan desa aman damai 2018-2020, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa aman damai priode 2018 sampai 2020 dan pemerintah Desa Aman Damai

### 3.2.2 Sampel

Sampel merupakan karakteristik dan jumlah dari bagian tertentu yang ada pada populasi tersebut, bila populasi tersebut besar maka dalam populasi tidak dapat mempelajari seluruh data yang ada. Dalam sampel itu yang dipelajari, kesimpulannya akan bisa di berlakukan. Sampel yang

diperoleh dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili (Sugiyono 2017:81).

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Teknik sampling jenuh yaitu Teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi menjadi sampel.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini ada 2 jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 3.3.1 Jenis Data

##### 1. Kualitatif

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) Data Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain

##### 2. Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2018) Data Kuantitatif adalah metode yang berdasarkan filsafat positif bertujuan menggambarkan dan menguji hipotesis yang dibuat penelitian. Penelitian kuantitatif membuat banyak angka-angka mulai dari pengumpulan, pengelolaan, serta hasil yang didominasi angka.

### 3.3.2 Sumber Data

#### 1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2017:255), data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Perolehan data primer umumnya dimulai dari masalah penelitian, variabel dan rumusan masalah yang kemudian datanya dicari melalui daftar atau butir-butir pertanyaan. Dalam penyusunan skripsi ini, data primer akan diperoleh dari wawancara dengan pemerintah desa aman damai terkait realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung melalui objek yang diteliti antara lain dilakukan melalui sudi literatur, perpustakaan dan arsip/laporan. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen sebagai berikut

- a. Laporan realisasi tahun 2018-2020
- b. Laporan Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018-2020
- c. Profil desa Aman Damai
- d. Data lainnya terkait dalam penyusunan skripsi

### 3.4 Teknik pengumpulan data

Riset data merupakan suatu bahan yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu penelitian dan selanjutnya diproses, dianalisis dan kemudian hasilnya

akan disajikan pada skripsi ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode -pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Metode penelitian lapangan ini terdiri dari:

#### **a. Pengamatan (*Observasi*)**

Menurut Sugiyono (2017:203) observasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan teknik yang lainnya. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Melalui teknik ini peneliti melakukan pengamatan langsung lapangan, pengamatan dilakukan secara langsung ke Desa Aman Damai setelah itu hasil pengamatan diolah menjadi data sesuai dengan judul skripsi.

#### **b. Wawancara (*Interview*)**

Menurut Sugiyono (2017:194), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan di teleti. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.



Pada metode ini informan yang diwawancarai adalah Kepala Desa dan perangkat Desa Aman Damai. Pertanyaan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi, dimana wawancara yang dilakukan dengan responden akan direkam serta data secara tertulis.

## **2. Studi Pustaka (*Library Research*)**

Studi pustaka dengan cara membaca dari buku-buku, internet yang berhubungan dengan judul yang dibahas, dan dokumen-dokumen desa yang mendukung data sesuai dengan penelitian dalam penulisan skripsi.

### **3.5 Metode Pengolahan Data**

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data yaitu memilih dan memfokuskan yang penting dan merangkum data pokok. Didalam reduksi data, laporan-laporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan baku mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

#### **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah suatu penyajian data dengan naratif dan teks. Dalam proses ini peneliti menyajikan data yang sudah di reduksi kedalam sebuah laporan yang sistematis. Disajikan dalam bentuk narasi yaitu realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa Aman Damai.

#### **3. Penarikan kesimpulan**



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa jika Laporan realisasi dan belanja desa. Anggaran pendapatan lebih tinggi dari pada realisasi pendapatan maka menghasilkan selisih bertambah. Semakin besar tingkat realisasi pendapatan dibandingkan dengan target yang dianggarkan maka semakin tinggi tingkat efektifnya, sedangkan anggaran belanja desa lebih besar dari pada realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemerintah desa mampu mengefesiensikan belanja desanya.

1. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja oleh Desa tahun 2018-2020 cukup baik untuk setiap tahunnya walaupun anggaran dan

pendapatan yang diterima oleh Desa Aman Damai berbeda-beda untuk setiap tahunnya namun dapat direalisasikan dengan cukup baik. Pendapatan yang diperoleh Desa Aman yaitu dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer, jumlah pendapatan yang yang lebih besar diterima yaitu pendapatan transfer dengan nilai Rp1.189.854.000 dan nilai pendapatan asli desa mencapai Rp28.428.000 dengan demikian pada tahun 2018 persentase pada anggaran pendapatan mencapai 100% dan anggaran belanja mencapai 98% meskipun belanja desa tidak terealisasi secara keseluruhan tetapi keuntungan atau surplus yang diterima oleh Desa Aman Damai masuk kedalam pembiayaan sebesar Rp78.297.800

2. Pada tahun 2019 pendapatan yang diper oleh Desa meningkat dari tahun sebelumnya tetapi pendapatan asli desa sangat menurun dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp3.500.000 tetapi anggaran pendapatan sudah direalisaikan dengan baik. Hal ini dilihat dari realisasi anggaran pendapatan mencapai 100% dan anggaran belanja 98%
3. Pada tahun 2020 realisasi anggaran pendapatan dan anggaran belanja desa sudah direalisasikan dengan sangat baik meskipun anggaran belanja desa lebih tinggi dari pada anggaran pendapatan desa yang mencapai 102%. Penyebab terjadinya realisasi lebih besar dibandingkan anggaran belanja yaitu karena pada tahun 2020 Desa

Aman Damai mengeluarkan biaya tak terduga untuk penanggulangan bencana alam sebesar Rp111.000.000 dengan demikian sisa laporang tahun sebelumnya atau silpa harus digunakan sebesar Rp10.255.000.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan diatas maka maka penulis memberikan saran sebagai berikut

### 1. Bagi pemerintah desa

Pendapatan yang diterima Desa Aman Damai sudah meningkat setiap tahunnya namun pendapatan asli desa seperti dari hasil usaha desa setiap tahunnya menurun untuk itu Desa Aman Damai perlu memperhatikan BumDes yang ada sehingga pendapatan asli desa tidak menurun setiap tahunnya.

Realisasi anggaran pendapatan dan Belanja desa sudah direalisasikan dengan baik untuk itu perlu di pertahankan atau di tingkatkan guna dalam membangun desa

### 2. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih banyak sumber untuk mencari laporan laporan keuangan dan data keuangan desa yang aan diteliti

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul. 2012. Teori, Konsep, dan aplikasi akuntansi sector public, dari anggaran hingga laporan keuangan, dari pemerintah hingga tempat ibadah. Jakarta: Selemba 4

- Dedi. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Eka Arieska. (2019). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Studi Empiris pada Desa Banjorejo Kecamatan Boja). Skripsi. Universitas Wahid Hasyim, Semarang
- Dedi. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Indra. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta Selemba Empat
- Kholifatul. (2018). Analisis Pendapatan Desa Terhadap Pendapatan Desa ( Studi Kasus Pada Desa Sambilawang). Skripsi. Universitas Islam Majapahit. Mojokerto
- Mardiasmo. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta
- Nurlan (2017). Analisis kinerja Anggaran pendapatan dan Belanja daerah kabupaten morawali, vol. 3 No.1.
- Puspawardani, W. (2017). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh pemerintah desa di desa paraknmanggu kecamatan parigi kabupaten pangandara. Dipetik maret, 27, 2022. Jurnal dinamik (online), vol. 4, No.1
- Permendagri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rusdi. (2018). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang). Skripsi. Universitas Muhammadiyah. Makassar
- Seoharjo, E. D. (2017). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDes Tahun 2015.Vol.4 No.3
- Siregar, B. (2015). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan pemerintah



Daerah Berbasis Akrual). Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Sugiyono. (2017) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet

Sukasmanto. 2004. Promosi Otonomi Desa. Yogyakarta: IRE Press.

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Dea

Undang-Undang Republik Indonesia No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Utomo, S. J. (2015) Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa. Jurnal Mediatrend, Vol. 10, No. 1, Hal : 19-31

Wiratna, (2015). Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Karangn Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press



## Lampiran 1

## Laporan keuangan Desa Aman Damai 2018

Lampiran Peraturan Desa  
Nomor 02  
Tahun 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA AMAN DAMAI  
TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<b>PENDAPATAN</b>		
1.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>28.428.000,00</b>	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	7.500.000,00	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	20.928.000,00	
1.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.189.854.000,00</b>	
1.2.1.	Dana Desa	689.414.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	13.957.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	486.483.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.218.282.000,00</b>	
2.	<b>BELANJA</b>		
2.1.	<b>Belanja Desa</b>	<b>1.139.984.200,00</b>	
2.1.1.	Belanja Pegawai	292.480.000,00	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	274.038.000,00	
2.1.3.	Belanja Modal	573.466.200,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.139.984.200,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>78.297.800,00</b>	
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	
3.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>78.297.800,00</b>	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	78.297.800,00	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(78.297.800,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Medan, 05 Juli 2022  
KEPALA DESA  
**KEPELA DESA  
AMAN DAMAI**  
SUHERMAK  
KEC. SIRAPIH

Printed by Siskaudes 05/07/2022 10:04:01


Halaman 1

### Lampiran 2

### Laporan Keuangan Desa Aman Damai 2019

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA AMAN DAMAI TAHUN ANGGARAN 2019				
Sumberdana : D/L Pendapatan Lain Lain			Realisasi s.d 31/12/2019	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	2.461.280,00	2.461.280,00
4.3.6	Bunga Bank	0,00	2.461.280,00	2.461.280,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.280,00</b>	<b>2.461.280,00</b>
5.	BELANJA			
01	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>3.002.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
01.01	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional	0,00	22.500,00	22.500,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P)	0,00	22.500,00	22.500,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	22.500,00	22.500,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	22.500,00	22.500,00
5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	22.500,00	22.500,00
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintaha	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00
5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lai	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>3.002.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(2.980.000,00)</b>	<b>(541.220,00)</b>	<b>(2.438.780,00)</b>
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.780,00</b>	<b>(2.438.780,00)</b>

Aman Damai, 05 Juli 2022  
Pejabat Kepala Desa




Lampiran 3



### Laporan Keuanga Desa Aman Damai 2020

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA AMAN DAMAI KECAMATAN SIRAPIT KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2020				
	Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Transfer		1.279.012.000,00	1.306.121.000,00	27.109.000,00
Dana Desa		779.274.000,00	770.673.000,00	8.601.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		15.458.000,00	15.536.000,00	78.000,00
Alokasi Dana Desa		484.280.000,00	519.912.000,00	35.632.000,00
Pendapatan Lain-lain		2.425.788,00	1.075.967,00	1.349.821,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.281.437.788,00</b>	<b>1.307.196.967,00</b>	<b>25.759.179,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		463.292.608,00	574.280.910,00	110.988.302,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		697.977.300,00	512.648.300,00	185.329.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		57.929.600,00	43.953.200,00	13.976.400,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		76.296.700,00	81.024.000,00	4.727.300,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		0,00	111.000.000,00	111.000.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.295.496.208,00</b>	<b>1.322.906.410,00</b>	<b>27.410.202,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(14.058.420,00)</b>	<b>(15.709.443,00)</b>	<b>1.651.023,00</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		14.058.420,00	14.058.420,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>14.058.420,00</b>	<b>14.058.420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>(1.651.023,00)</b>	<b>1.651.023,00</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

AMAN DAMAI, 05 Juli 2022  


### Lampiran 5

## Badan Usaha Desa Aman Damai



## Lampiran 5

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang





## Surat Balasan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**  
**KECAMATAN SIRAPIT**  
**DESA AMAN DAMAI**  
Jl. Hasanuddin Dusun V Kode Pos:20773

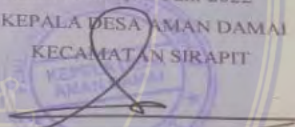
**SURAT KETERANGAN**  
No: 83/AD/SK/VI/2022

1. Kepala Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, dengan ini menerangkan bahwa,

No	Nama	NPM	Program Studi	Judul
1	DEA NOVITASARI	188330078	AKUTANSI	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat Tahun 2018 s/d 2020

2. Benar dan sesungguhnya nama tersebut diatas telah Selesai melakukan Research/Survey ke Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Aman Damai, 03 Juni 2022  
KEPALA DESA AMAN DAMAI  
KECAMATAN SIRAPIT  
  
SUGIMAN